

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN
AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL**

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

RIJALUL MUHSIN

17043025

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS
PUBLIK TERHADAP KINERJA MANAJERIAL**

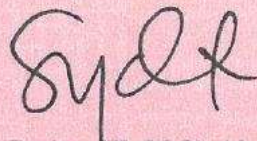
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)

Nama : Rijalul Muhsin
NIM/TM : 17043025/2017
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021

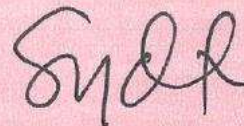
Disetujui Oleh :

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

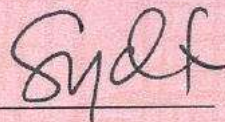


HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Judul : Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial (*Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang*)
Nama : Rijalul Muhsin
NIM/TM : 17043025/2017
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D	1. 
2	Anggota	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	Herlina Helmy, SE, M.S.Ak	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rijatul Muhsin
NIM/Tahun : 17043025/2017
Tempat, Tgl. Lahir : Surian, 27 September 1998
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akutansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Dr. Moh. Hatta, Gg. Baburrahmah,
Kel.Anduring, Kec. Kuranji
No. HP/Telp : 082284592234
Judul Skripsi : Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas
Publik terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, September 2021



Rijatul Muhsin

ABSTRAK

Rijalul Muhsin. 17043025/2017. “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang”. Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Pembimbing : Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang yaitu sebanyak 110 responden. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang, sedangkan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang.

Kata Kunci : Kinerja Manajerial, Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Publik

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada penulis berupa kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan dorongan berbagai pihak dalam rangka penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Dosen pembimbing Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D, dosen penguji Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si dan Ibu Herlina Helmy, SE, M.S.Ak yang telah membimbing dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Jurusan Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Istimewa kepada kedua orang tua, terutama ayah saya yang sudah meninggalkan saya untuk selamanya di saat H-2 saya di wisuda. Segala

bentuk pengorbanan yang telah ayah lakukan untuk saya, Insya Allah akan jadi catatan amal jariyah dan diberi balasan surganya Allah SWT. .

6. Terima kasih juga untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bentuk dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dibalas Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda serta bernilai ibadah di sisi-Nya. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembacanya maupun penulis sendiri. Penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kemajuan ilmu pengetahuan kedepannya, akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Padang, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori.....	15
1. Teori Penetapan Tujuan.....	15
2. Kinerja Manajerial.....	16
3. Partisipasi Anggaran.....	19
4. Akuntabilitas Publik.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Konseptual.....	38
D. Pengembangan Hipotesis.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Populasi dan Sampel.....	43
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Model dan Teknik Analisis Data.....	45
F. Defenisi Operasional.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 53
B. Demografi Responden 53
C. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian..... 56
D. Uji Asumsi Klasik 58
E. Teknik Analisis Data 61
F. Pembahasan 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Keterbatasan Penelitian 71
C. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA..... 73

LAMPIRAN 78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Skala Pengukuran	52
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	53
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur ..	54
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan dan Masa Jabatan .	55
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Bidang Pendidikan Terakhir	56
Tabel 4.5 Uji Validitas	57
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas	58
Tabel 4.7 Uji Normalitas	59
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4.10 <i>Descriptive Statistics</i>	62
Tabel 4.11 Uji Regresi Linear Berganda.....	63
Tabel 4.12 Uji Statistik F	64
Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	79
Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian.....	84
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian	93
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	94
Lampiran 5 Bukti Penelitian SKPD.....	95

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesuksesan organisasi sektor publik tidak hanya diukur dari perspektif keuangan, namun juga dapat diukur dari perspektif nonkeuangan. Kesuksesan organisasi sektor publik dari perspektif nonkeuangan dapat dilakukan dengan mengukur kinerja penyelenggaraan organisasi tersebut (Nordiawan dan Hertianti, 2010: 157). Mardiasmo (2002: 121) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja di dalam organisasi sektor publik dilakukan dalam rangka memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memberikan bantuan atas perbaikan kinerja pemerintah. *Kedua*, pengukuran kinerja digunakan untuk pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. *Ketiga*, pengukuran kinerja dimaksudkan untuk perbaikan atas komunikasi kelembagaan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik.

Rivai dan Basri (2005: 50) menyatakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan atau hasil yang dicapai seseorang secara keseluruhan dalam periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti target, sasaran, kriteria dan standar hasil kerja yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Penjelasan tersebut mengarah kepada kinerja penyelenggaraan sebuah organisasi atau yang biasa disebut dengan kinerja manajerial. Mahoney *et al.* (1963) dalam Laksmi dan Nugroho (2018) menjelaskan kinerja manajerial merupakan kinerja dari setiap individu atau anggota yang ada dalam organisasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan

manajerial seperti perencanaan, investigasi, evaluasi, koordinasi, pemilihan staf, pengawasan, perwakilan dan negosiasi. Kinerja manajerial mengacu pada tindakan, perilaku dan hasil yang dapat diukur serta melibatkan karyawan atau dihasilkan karyawan terkait dengan kontribusi pada tujuan organisasi (Viswesvaran & Ones, 2000 dalam Derfuss 2016).

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional, penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia rata-rata cukup baik. Hal ini dilihat dari rata-rata skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berada pada rentang skor diatas 3,00 atau dengan status ST atau sangat tinggi dengan nilai skor maksimal 3,75. Akan tetapi jika dilihat secara urutan peringkat, untuk Kota Padang berada cukup jauh di bawah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia (Agus Dwi, 2020). Kota Padang secara nasional mendapatkan peringkat 41. Jika dilihat untuk cakupan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang berada pada peringkat 6. Skor ini berada di bawah kinerja Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam. Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Kota Padang tidak seharusnya mendapatkan skor kinerja yang rendah di Provinsi Sumatera Barat. Skor kinerja yang paling tinggi seharusnya mampu diraih oleh Kota Padang karena merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga mendapatkan rapor merah dari DPRD Kota Padang. Anggota DPRD Kota Padang, Mastilzal Aye mengatakan rapor merah disebabkan oleh adanya defisit anggaran sekitar Rp 59 miliar. Sejalan dengan rapor merah tersebut, Mastilzal Aye menegaskan bahwa setiap OPD hendaknya meminimalisir kegiatan dan program yang terkesan sia-sia agar dapat mengoptimalisasikan kegiatan yang mendukung pendapatan daerah (Posmetro, 2019). Defisit anggaran menandakan adanya permasalahan dalam fungsi anggaran sebagai alat pengendalian. Sementara dengan adanya anggaran sebagai alat pengendalian tersebut, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*) (Nordawan, Putra dan Rahmawati, 2012).

Pembahasan mengenai kinerja manajerial merupakan pokok bahasan yang biasa dibahas dalam akuntansi manajemen. Akan tetapi akuntansi manajemen mempunyai peran utama di dalam organisasi sektor publik yaitu akuntansi manajemen memberikan informasi akuntansi yang handal dan relevan kepada pimpinan atau manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi (Mardiasmo, 2002: 37). Informasi akuntansi memudahkan manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi mampu tercapai. Menurut Mardiasmo (2002) salah satu peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah dalam hal penganggaran. Salah satu fungsi anggaran adalah untuk alat perencanaan dan pengendalian. Upaya berkelanjutan dalam organisasi untuk meningkatkan daya saing dan kinerja mendorong manajemen untuk mencari cara untuk meningkatkan proses perencanaan dan

pengendalian anggarannya (Poon *et al.*, 2001). Dengan demikian, terdapat hubungan yang sangat erat antara akuntansi manajemen di sektor publik dengan penganggaran.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yang akan datang (Bastian, 2010). Anggaran menjadi instrumen kunci untuk mengetahui dan mengkomunikasikan praktik kerja sehari-hari dan mempertahankan posisi (Kruppu *et al.*, 2016). Halim dan Kusufi (2014) menjelaskan bahwa sebagai sebuah sistem, proses penganggaran sektor publik sudah mengalami banyak perkembangan. Sejarah perkembangan anggaran dalam pemerintahan Indonesia beriringan dengan perubahan peraturan perundang-undangan. Masa anggaran pertama dikenal dengan masa era prareformasi (sebelum otonomi daerah). Ciri utamanya adalah anggaran disusun dengan sistem tradisional dengan pendekatan inkremental dan *line item*. Pada era pasca-reformasi (1999-2004) proses penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan kinerja. Selanjutnya pada era reformasi lanjutan (2004-sekarang) menunjukkan pengelolaan keuangan daerah dengan penyempurnaan pada penganggaran yang berbasis kinerja.

Perubahan sistem penganggaran beriringan dengan munculnya istilah *New Public Management* (NPM). Sistem ini ditandai dengan perubahan sistem penganggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja (Indrawati, 2010). Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi, termasuk

informasi yang bersifat lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya. Heinle *et al.* (2014) mengatakan bahwa penyusunan anggaran yang dilakukan secara *bottom up* atau penganggaran dari bawah ke atas akan sangat bermanfaat karena kemampuan pimpinan untuk mendapatkan informasi lokal dan keterlibatan antara pimpinan dan bawahan dalam proses penganggaran meningkatkan motivasi dalam mencapai tujuan yang ditentukan.

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian terkait kinerja manajerial dengan variabel independen partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik. Penelitian oleh Poon *et al.* (2001) menguji partisipasi anggaran, saling ketergantungan tujuan, dan kontroversi di utilitas publik Cina. Penelitian ini menggunakan teori interdependensi tujuan untuk mengeksplorasi dampak dinamika tim pada penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat kerjasama yang tinggi dan ikut terlibat dalam partisipasi anggaran akan menghasilkan produktifitas kelompok dan memperkuat hubungan yang pada akhirnya akan menghasilkan anggaran yang berkualitas serta berakibat kepada kinerja yang lebih baik.

Derfuss (2015) menghubungkan variabel konteks dengan partisipasi anggaran dan penggunaan evaluatif ukuran kinerja menggunakan teori agensi dan psikologi di Jerman. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel konteks interpersonal berupa pertimbangan atasan dan dimensi gaya kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam partisipasi anggaran. Terdapat hubungan yang positif dan homogen, artinya atasan yang perhatian dan aktif mendorong manajerialnya akan mencapai tingkat partisipasi yang lebih

tinggi dan berdampak pada hasil kinerja manajerial yang lebih baik. Venkatesh & Blashkovich (2012) menguji efek mediasi modal psikologis pada hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja di Jerman menggunakan teori psikologi mengemukakan bahwa partisipasi anggaran secara signifikan dan positif terkait dengan modal psikologi karyawan yang pada gilirannya terkait dengan tingkat kinerja yang lebih tinggi.

Adanya akuntabilitas publik mampu meningkatkan kinerja manajerial karena semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas semua aktivitas yang dilaksanakan membuat kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi menjadi semakin baik pula. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Melia dan Sari (2019) yang menggunakan variabel akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini menggunakan *goal setting theory* dan menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial.

Penelitian oleh Dalla Via *et al.* (2019) menguji tentang bagaimana jenis akuntabilitas mempengaruhi proses pencarian informasi dan kualitas keputusan di Eropa Barat menggunakan teori penalaran kausal. Penelitian ini membagi akuntabilitas ke dalam akuntabilitas proses dan akuntabilitas hasil. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa jenis akuntabilitas dan pembedaan rantai kausal saling berinteraksi. Dalam akuntabilitas hasil, menyediakan rantai kausal sangat penting untuk mencapai kualitas keputusan yang tinggi, sedangkan dalam akuntabilitas proses, menyediakan rantai kausal mengurangi upaya pencarian informasi dan tidak meningkatkan pengambilan keputusan. Bouwman *et al.*

(2017) menganalisis tentang akuntabilitas dan koalisi di sebuah universitas Belanda. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik mengarah pada kinerja kelompok yang lebih rendah dalam negosiasi koalisi.

Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada tentang pengaruh partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan melakukan penelitian di beberapa organisasi sektor publik. Semakin banyak studi di beberapa sektor akan memungkinkan perbedaan hasil yang lebih baik (Derfuss, 2016). Partisipasi anggaran akan sangat bermanfaat jika dilakukan di beberapa organisasi karena tingkat partisipasi anggaran yang bervariasi di tiap-tiap organisasi (Poon *et al.*, 2001). Penelitian mengenai penganggaran partisipatif cukup langka dilakukan di organisasi sektor publik atau organisasi sektor layanan (Derfuss, 2015).

Penelitian ini mengukur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam segi anggaran sudah berdasarkan kepada penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja. Hal tersebut juga menjadi keterbaruan dalam penelitian ini dimana beberapa penelitian sebelumnya masih diukur secara tradisional berdasarkan kepada tinggi rendahnya serapan anggaran. Penelitian ini juga membahas kinerja berdasarkan kepada kinerja nonkeuangan dimana beberapa penelitian sebelumnya masih banyak berfokus kepada kinerja keuangan organisasi.

Tuntutan tanggung jawab terhadap penerapan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum merupakan salah satu tujuan pokok akuntansi pemerintahan. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana praktik tuntutan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan variabel akuntabilitas

publik. Penelitian lebih lanjut mengenai akuntabilitas diukur dengan menggunakan dimensi akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Mahmudi (2015). Penelitian ini mampu memperluas pengetahuan mengenai akuntabilitas publik dalam konteks praktik organisasi sektor publik dan penelitian ini juga mengembangkan akuntabilitas berbasis kepada kinerja karena penelitian ini mengintegrasikan penilaian kinerja pemerintah dengan akuntabilitas.

Dalam mengukur kinerja manajerial perlu dilakukan dengan berdasarkan pada anggaran yang ditetapkan oleh organisasi. Setiap organisasi, perusahaan, maupun instansi tentunya memerlukan anggaran untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Anggaran yang efisien dan efektif memerlukan partisipasi dari anggota organisasi, sehingga setiap anggota organisasi dituntut untuk aktif dalam berpartisipasi menyusun anggaran dan bersikap positif jika mengalami konflik peran (Bangun, 2017). Derfuss (2016) juga berpendapat bahwa salah satu elemen penting agar anggaran dapat terkontrol dengan baik adalah dengan adanya partisipasi anggaran.

Partisipasi anggaran merupakan tingkat keterlibatan pimpinan dan bawahan dalam berpartisipasi untuk menyiapkan anggaran dan dapat memberikan pengaruh atas tujuan anggaran dari masing-masing pusat pertanggungjawaban (Kenis, 1979). Proses partisipasi anggaran bergantung pada pelaporan manajerial, sehingga memberdayakan pimpinan atau manajer untuk mempengaruhi aktivitas dan target kinerja mereka sehari-hari (Heinle *et al.*, 2014). Partisipasi anggaran menggambarkan proses dimana individu yang tergabung dalam partisipasi tersebut kinerjanya akan dievaluasi dan mungkin akan diberi penghargaan atas

target yang telah dicapai (Derfuss, 2015). Untuk mencapai kinerja manajerial yang efektif bawahan organisasi perlu diikutsertakan dalam penyusunan anggaran (Milani, 1975). Hal ini berdasarkan kepada pemikiran bahwa ketika tujuan disusun dengan mekanisme partisipatif maka individu yang ada di dalamnya akan mempunyai rasa tanggungjawab dalam melaksanakan anggaran dengan sebaik mungkin. Selain itu, bawahan sering kali mempunyai informasi yang lebih baik tentang kemampuan dan faktor lingkungan mereka dari pada atasan (Brink *et al.*, 2018).

Tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja manajerial dalam organisasi sektor publik tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jermias & Setiawan (2008) yang berpendapat bahwa partisipasi anggaran memberikan keuntungan kepada organisasi dengan fasilitas komunikasi yang lebih baik, komitmen yang tinggi, kepuasan kerja yang lebih besar dan pada akhirnya membuat kinerja menjadi lebih tinggi. Begitupun dengan Milani (1975) yang menyebutkan bahwa manajerial organisasi akan bekerja pada tingkat yang lebih tinggi dalam situasi yang partisipatif. Alasan tersebut merupakan nilai penguatan dari pekerjaan yang dilakukan dalam pengaturan partisipatif. Hal tersebut merupakan prinsip dasar yang menjelaskan bahwa tingkat kinerja yang tinggi akan diperoleh dalam situasi penguatan pekerjaan yang cukup besar, sedangkan tingkat kinerja yang rendah akan terjadi pada mereka yang tingkat penguatan pekerjaannya kecil (Milani, 1975).

Penelitian ini sesuai dengan *goal setting theory* yang dikemukakan oleh Locke (1960). Dalam teori ini dijelaskan bahwa tujuan yang ditetapkan oleh individu sendiri akan cenderung bekerja lebih baik dari tujuan yang diturunkan dari atasan. Hal ini disebabkan oleh rasa komitmen dan tanggung jawab atas tujuan yang telah ditetapkan sendiri. Saat berpartisipasi dalam proses penetapan anggaran, individu akan memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan spesifik yang menantang tetapi dapat dicapai (Venkatesh & Blashkovich, 2012). Anggaran yang dilaksanakan atas dasar partisipasi merupakan bentuk tujuan yang ditetapkan sendiri sehingga partisipasi anggaran mampu meningkatkan kinerja manajerial (Colbert, 2005 dalam Laksmi dan Nugroho 2018). Implikasi dari teori ini adalah untuk mendapatkan nilai kinerja manajerial yang baik, harus ada kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan individu sendiri dengan tujuan organisasi. Individu yang paham dengan tujuan anggaran yang jelas dan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan memiliki kinerja yang baik dibandingkan dengan individu yang tidak tau dengan arah dan tujuan anggaran (Melia dan Sari, 2019).

Partisipasi yang besar dalam penganggaran dengan melibatkan banyak orang memungkinkan lebih banyaknya pendapat yang dikemukakan sehingga cakupan perencanaan dan pengendalian anggaran menjadi lebih luas (Bryer, 2014). Penyusunan anggaran yang dilakukan dengan partisipatif menunjukkan seluruh aparat yang tergabung dalam organisasi sektor publik mampu memahami dan mengetahui arah dan tujuan organisasi yang dituangkan dalam anggaran. Tujuannya adalah untuk peningkatan kinerja melalui anggaran yang

diselenggarakan dengan baik. Hal ini memperlihatkan manajerial organisasi sektor publik mempunyai tuntutan akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang besar atas penyelenggaraan organisasi tersebut. Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan sudah diselenggarakan dengan baik atau belum (Brandsma & Schillemans, 2012). Akuntabilitas dapat dipahami sebagai tanggung jawab untuk menciptakan dampak positif jangka panjang dalam menangani misi atau tujuan manfaat publik organisasi (Frumkin, 2002 dalam Williamson & Luke 2021). Dalam akuntabilitas, manajerial bertanggungjawab atas hasil atau kinerja dari keputusan yang dibuat dan sejauh mana mereka mampu membenarkan keputusan tersebut (Dalla Via *et al.*, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Budding (2004) menunjukkan bahwa dengan meminta pertanggungjawaban manajer atas hasil akan mengarahkan pada peningkatan kinerja pemerintah jika kondisi tertentu terpenuhi. Akuntabilitas dipandang sebagai mekanisme kontrol demokrasi yang diklaim dapat meningkatkan kinerja, meningkatkan integritas pemerintahan publik, dan memberikan persepsi kepercayaan dan transparansi dengan masyarakat (Bouwman *et al.*, 2017). Tan (2014) dalam penelitiannya yang fokus pada akuntabilitas berbasis kinerja pada pemerintah Cina berpendapat bahwa akuntabilitas tidak didasarkan pada input sumber daya, audit fiskal, atau proses administratif. Ini didasarkan pada penilaian kinerja pemerintah, menghubungkan alokasi anggaran, hubungan kekuasaan, promosi pejabat pemerintah dan kinerja organisasi. Oleh sebab itu sistem akuntabilitas diatur untuk memantau keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan melalui pengukuran kinerja.

Mahmudi (2015: 9) menjelaskan akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik kepada DPRD dan masyarakat.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Laksmi dan Nugroho (2018) dengan judul pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial studi empiris pada pemda Kabupaten Pekalongan, pemda Kota Pekalongan, dan pemda Kabupaten Sleman. Penelitian ini penting dilakukan di Kota Padang mengingat fenomena yang ada bahwa skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Padang dinilai cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kompleksitas persoalan dan kapasitas sumber daya yang memadai menjadikan Kota Padang menarik untuk menjadi objek penelitian. Penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya juga belum ada melakukan penelitian di Kota Padang, sehingga menjadikan Kota Padang merupakan penelitian pertama yang membahas tentang variabel penelitian yang digunakan oleh penelitian ini. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini ingin menginvestigasi apakah partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik menjadi faktor dalam tingkat skor kinerja pada penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Padang.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang dengan judul penelitian **“Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini.

1. Mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang.
2. Mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diketahui manfaat dari penelitian ini.

1. Bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang akuntansi sektor publik khususnya tentang pengaruh partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial.
2. Bagi Instansi Pemerintah
Memberikan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah baik dari segi partisipasi anggaran

dan akuntabilitas publik untuk meningkatkan kinerja manajerial pemerintah daerah.

3. Bagi akademik

Memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kinerja manajerial dan bahan masukan bagi penelitian berikutnya yang tertarik dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.